

## DAFTAR PUSTAKA

- Asumsi.co. 2022. “ASN Diduga Suplai Amunisi-Senjata ke KKB.” <https://asumsi.co/post/67192/asn-diduga-suplai-amunisi-senjata-ke-kkb/>. Diakses 26 Juli 2022.
- BBC. 2018. “Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan Papua dari Indonesia, Apa dan Siapa Mereka?” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>. Diakses 6 Maret 2022.
- BBC. 2021. “Penangkapan Aktivis Papua dan Label KKB Teroris, Kemunduran Solusi Damai dan Timbulkan Eskalasi Kekerasan.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57059552>. Diakses 16 Februari 2022.
- CNN. 2021. “Arahan Jokowi: Selesaikan Masalah Papua Tanpa Senjata.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615093052-20-654399/arahan-jokowi-selesaikan-masalah-papua-tanpa-senjata>. Diakses 18 Mei 2022.
- AR, Muchson. 2004. “Dimensi Moral Dalam Kekuasaan Politik.” *Jurnal Civics* 1 (2): 129-140.
- Arendt, Hannah. 1970. *On Violence*. New York: A Harvest Book.
- Bakker, Anton, dan Achmad C. Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyono. 2012. “Menjaga Etika Dalam Berpolitik.” *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1 (1): 51-60.
- Djopari, Johannes R. 1991. “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik Di Irian Jaya Dari Tahun 1964 Sampai Dengan Tahun 1984).” *Tesis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Effendi, Tolib, dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. 2021. “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana.” *Jurnal RechtIdee* 16 (2): 223-245.
- Firmansyah, Hery. 2010. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”. *Mimbar Hukum* 23 (2): 237-42.
- Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM). 2022. *Laporan Tindak Kekerasan di Papua (Januari 2010 - Maret 2022) Edisi 31 Maret 2022*.

- Hafiz, Muhammad, dan Surya Muki Pratama. 2021. "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7 (1): 87-104.
- Haryatmoko, Johannes. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Haryatmoko, Johannes. 2005. "Penerimaan Pluralitas Agama Sebagai Syarat Kemungkinan Etika Politik." *Jurnal Unisia* 58 (4):365-380.
- Haryatmoko, Johannes. 2016. "Akuntabilitas Pelayanan Publik (Etika Publik Sebagai Dasar Membangun Integritas dan Profesionalitas)." *Seminar Nasional Indonesia yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*.
- Hukum Online. 2022. "4 Sebab Masyarakat Sipil Papua Kerap Menjadi Korban Kekerasan Bersenjata." <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-sebab-masyarakat-sipil-papua-kerap-menjadi-korban-kekerasan-bersenjata-lt630ee2b4eb173/>. Diakses 25 September 2022.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Jena, Yeremias. 2011. "Pemikiran Hannah Arendt Mengenai Kekerasan Dalam Kekuasaan." *Jurnal Diskursus* 10 (2): 166-190.
- Kemenko Polhukam RI. 2021. *Siaran Pers No: 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021*.
- Kompas. 2021. "Mahfud MD Sebut UU Pemberantasan Terorisme Jadi Dasar bagi Penanganan KKB di Papua." <https://www.kompas.tv/article/170784/mahfud-md-sebut-uu-pemberantasan-terorisme-jadi-dasar-bagi-penanganan-kkb-di-papua?page=all>. Diakses 26 Juli 2022.
- Kompas. 2022. "Temuan Imparsial: 3.657 Personel Non-Organik TNI-Polri Dikirim ke Papua Januari-Agustus 2022." <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/30/21471151/temuan-imparsial-3657-personel-non-organik-tni-polri-dikirim-ke-papua>. Diakses 26 September 2022.

- KontraS. 2021. *Menyoal Redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Organisasi Teroris*.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1994. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Magnis-Suseno, Franz. 1988. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Moento, Paul Adryani, Fransiskus Wuniyu, dan Welem Levi Betaubun. 2020. "Politik Keamanan Dalam Penyelesaian Konflik di Papua." *Jurnal Noken* 6 (1): 36-48.
- MPR RI. 2021. "Menegakkan Kedaulatan NKRI di Papua" "Antara Otonomi Khusus dan Kekerasan di Papua." *Majalah Majelis Edisi No.11/Th.XV/November 2021*.
- Nugroho, Aldiano Hadi. 2019. "Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Pamungkas, Cahyo, dan Suma R. Rusdiarti, eds. 2017. *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Pinter Politik. 2020. "Sejarah OPM, Juang Merdeka di Tanah Papua." <https://www.pinterpolitik.com/sejarah/sejarah-opm-juang-merdeka-di-tanah-papua/>. Diakses 6 Maret 2022.
- Rohmah, Usisa. 2016. "Etika Politik dan Kekuasaan." *Jurnal Etika & Pemilu* 2 (3): 39-59.
- Rosyidi, Achmad F. 2017. *Ambiguitas Politik HAM di Papua: Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua Tahun 2016*. Jakarta: Publikasi Masyarakat Setara.
- Sudira, I. N., Cahyo Pamungkas, Fachri Aidulsyah, Elvira Rumkabu, dan Yuliana Langowuyo. 2020. *Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua*. Jakarta: IMPARSIAL.

Sudira, I. N., Cahyo Pamungkas, Puji Hastuti, Paulus R. Yuniarto, dan Elvira Rumkabu. 2021. *Membangun Fondasi Perdamaian di Papua: Studi Kasus Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Infrastruktur*. Jakarta: IMPARSIAL.

Sukmana, Oman. 2016. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sospol* 2 (1): 103-122.

Thompson, Dennis F. 2000. *Etika Politik Pejabat Negara (terjemahan Benyamin Molan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

VOA Indonesia. 2022. "Pengiriman Pasukan Tempur ke Papua Dinilai Tak Perlu." <https://www.voaindonesia.com/a/pengiriman-pasukan-tempur-ke-papua-dinilai-tak-perlu/6722255.html>. Diakses 25 September 2022.